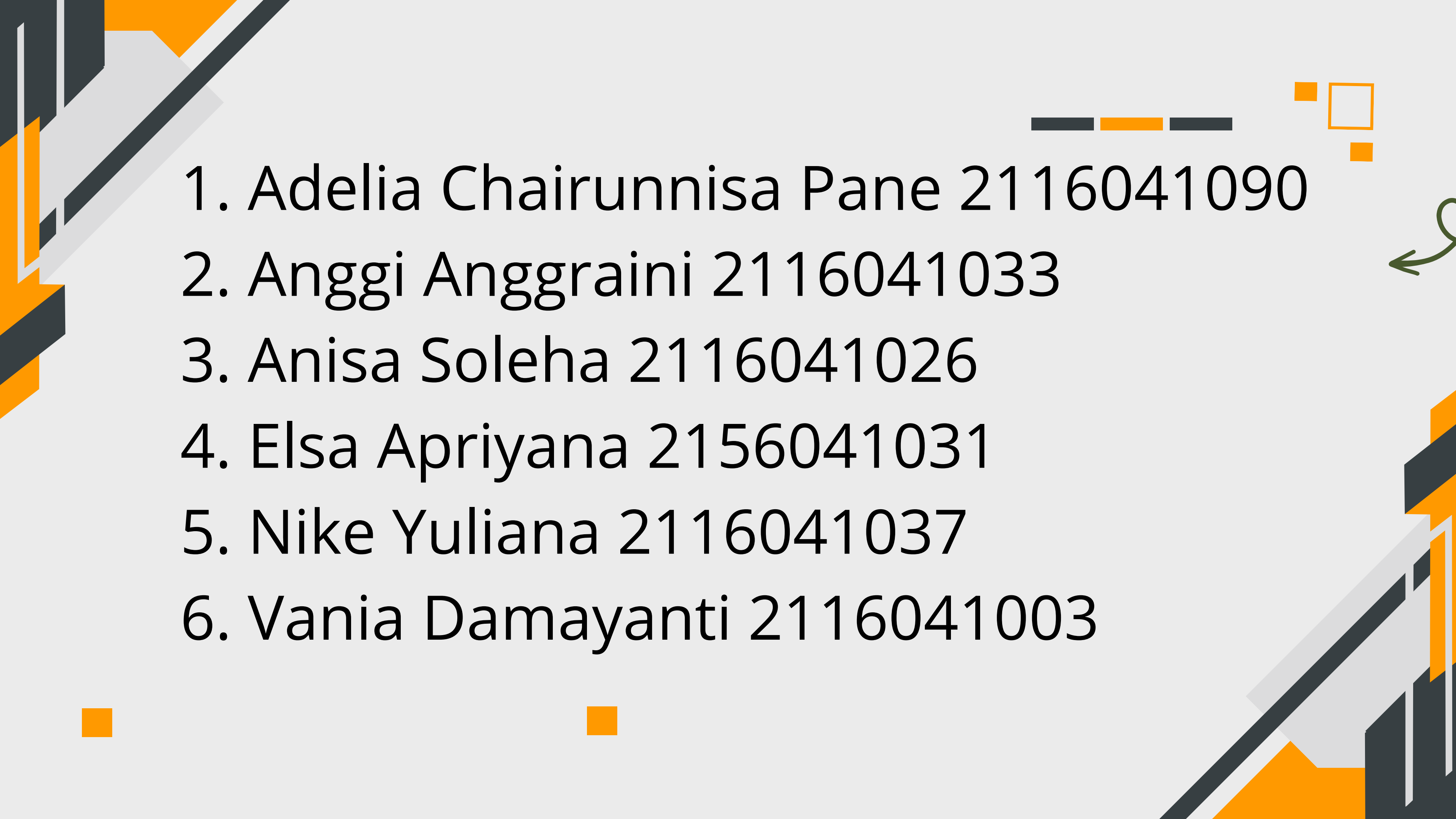


# KONSEP DAN TEORI PEMBANGUNAN — BERKELANJUTAN (SDGs)

Mata Kuliah :  
Analisis Dampak Pembangunan

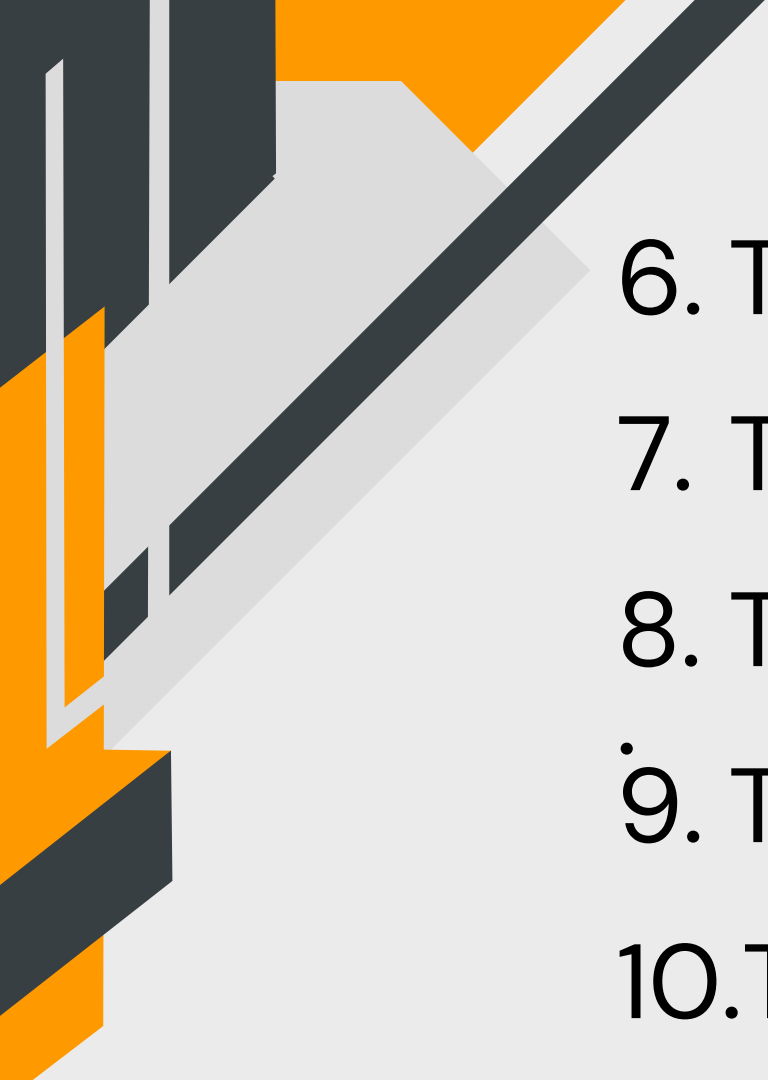
- 
- 
- 
1. Adelia Chairunnisa Pane 2116041090
  2. Anggi Anggraini 2116041033
  3. Anisa Soleha 2116041026
  4. Elsa Apriyana 2156041031
  5. Nike Yuliana 2116041037
  6. Vania Damayanti 2116041003

# 1. KONSEP DAN TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaknai sebagai pembangunan untuk masa kini dan yang tidak memerlukan kompromi generasi yang akan datang muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang.

## **Berikut adalah beberapa teori utama tentang pembangunan berkelanjutan:**

1. Teori Brundtland (1987) 
2. Teori Kapasitas Membawa (Carrying Capacity)
3. Teori Ekologi Manusia (Human Ecology)
4. Teori Ekonomi Hijau (Green Economy)
5. Teori Keadilan Antargenerasi (Intergenerational Equity)

- 
- 
- 6. Teori Pembangunan Manusia (Human Development)
  - 7. Teori Tata Kelola yang Baik (Good Governance)
  - 8. Teori Partisipasi Masyarakat (Public Participation)
  - 9. Teori Kearifan Lokal (Local Wisdom)
  - 10. Teori Teknologi Tepat Guna (Appropriate Technology)

Teori-teori ini saling terkait dan memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Implementasi pembangunan berkelanjutan di lapangan memerlukan kombinasi dari berbagai teori dan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal.



## 2. PRINSIP DAN TUJUAN SDGs

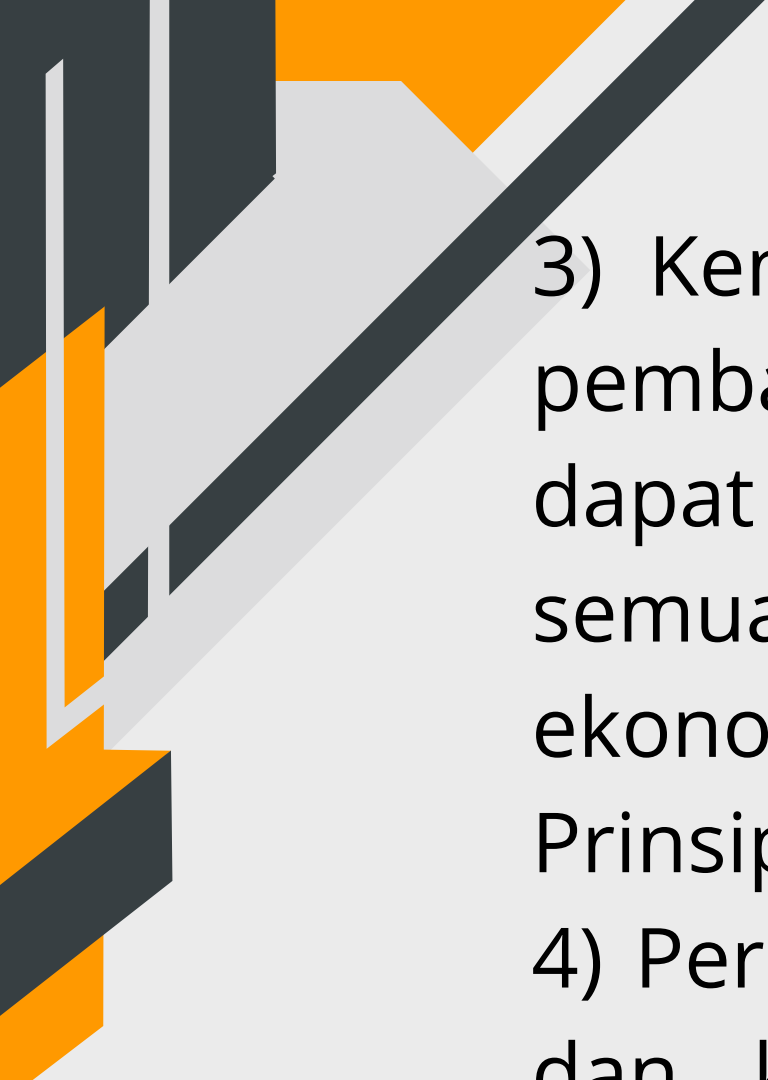
### A. Prinsip SDGs

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, diantaranya yaitu:

1) Manusia (People), Seluruh aspek kehidupan manusia merupakan hal yang penting sehingga pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, kesehatan, kehidupan layak, pendidikan, hingga kesetaraan gender harus dapat diwujudkan. Prinsip people ini mencakup target SDGs nomor 1 sampai 5.

2) Bumi (Planet), prinsip ini berkaitan dengan dibutuhkannya kerja sama komunitas internasional dalam melindungi bumi dari kerusakan. Upaya ini dapat dilakukan dengan manajemen air, pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, kebijakan perlindungan lingkungan, dan proteksi ekosistem. Hal ini mencakup target

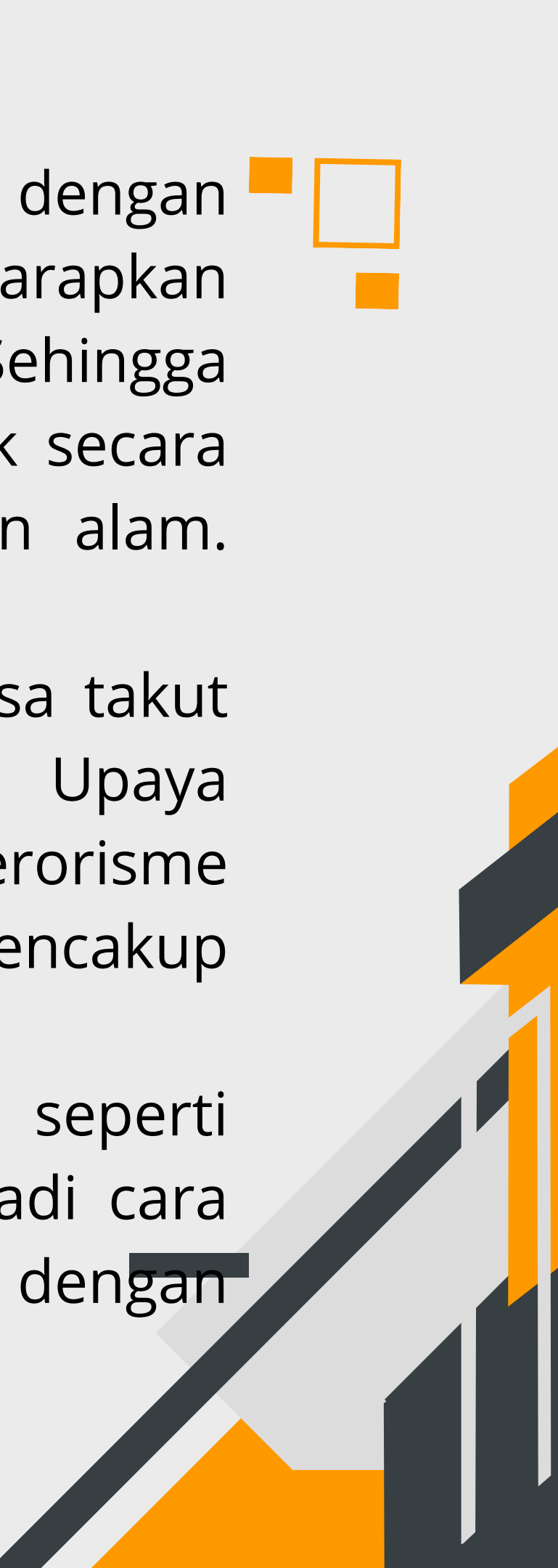
SDGs nomor 6, 12 sampai 15.



3) Kemakmuran (Prosperity), Kemakmuran dapat diwujudkan dengan pembangunan ekonomi namun dalam mewujudkannya diharapkan dapat melibatkan seluruh aktor dan menjunjung keadilan. Sehingga semua manusia dapat hidup dan menikmati kemakmuran, baik secara ekonomi, sosial, maupun teknologi yang juga selaras dengan alam. Prinsip ini mencakup target SDGs nomor 7 sampai 11.

4) Perdamaian (Peace), Masyarakat yang inklusif, bebas dari rasa takut dan kekerasan menjadi harapan pada prinsip kedamaian. Upaya memperkuat institusi dapat meminimalkan ancaman seperti terorisme dan konflik, meskipun melalui cara non militeristik. Prinsip ini mencakup target SDGs nomor 16.

5) Kerjasama (Partnership), Kerja sama dari seluruh aktor, seperti pemerintah, sektor privat, dan masyarakat secara global menjadi cara untuk mencapai seluruh target SDGs pada tahun 2030, sesuai dengan target nomor 17.

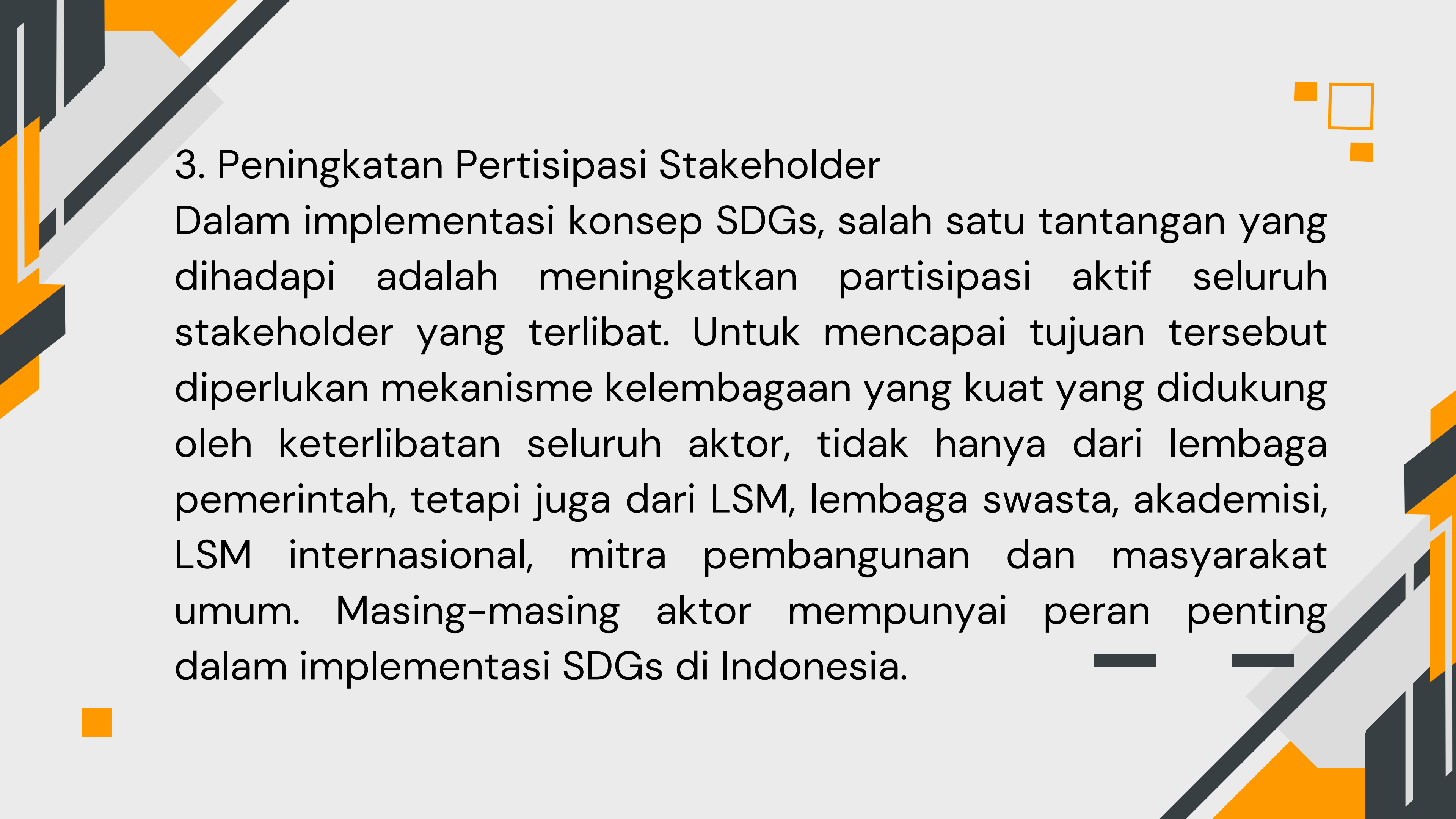


# 3.TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN SDGs di INDONESIA

## A. Tujuan SDGs

Berikut beberapa tantangan dan peluang penerapan SDGs di Indonesia (Amirya, M: 2023).

1. Penyelarasan SDGs Dengan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah  
Dalam mengimplementasikan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berupaya menyesuaikan isi SDGs global dengan peraturan nasional dan regional.
2. Koordinasi Vertical Dan Horizontal Antar Lembaga Pemerintah  
Peningkatan koordinasi vertikal dan horizontal dalam konteks implementasi SDGs merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi upaya menuju terlaksananya tujuan SDGs. Sebelum konsep SDGs diadopsi dalam pemerintahan Indonesia, setiap lembaga pemerintah bertanggung jawab pada sektor-sektor tertentu sesuai dengan konstitusi dasar negara.

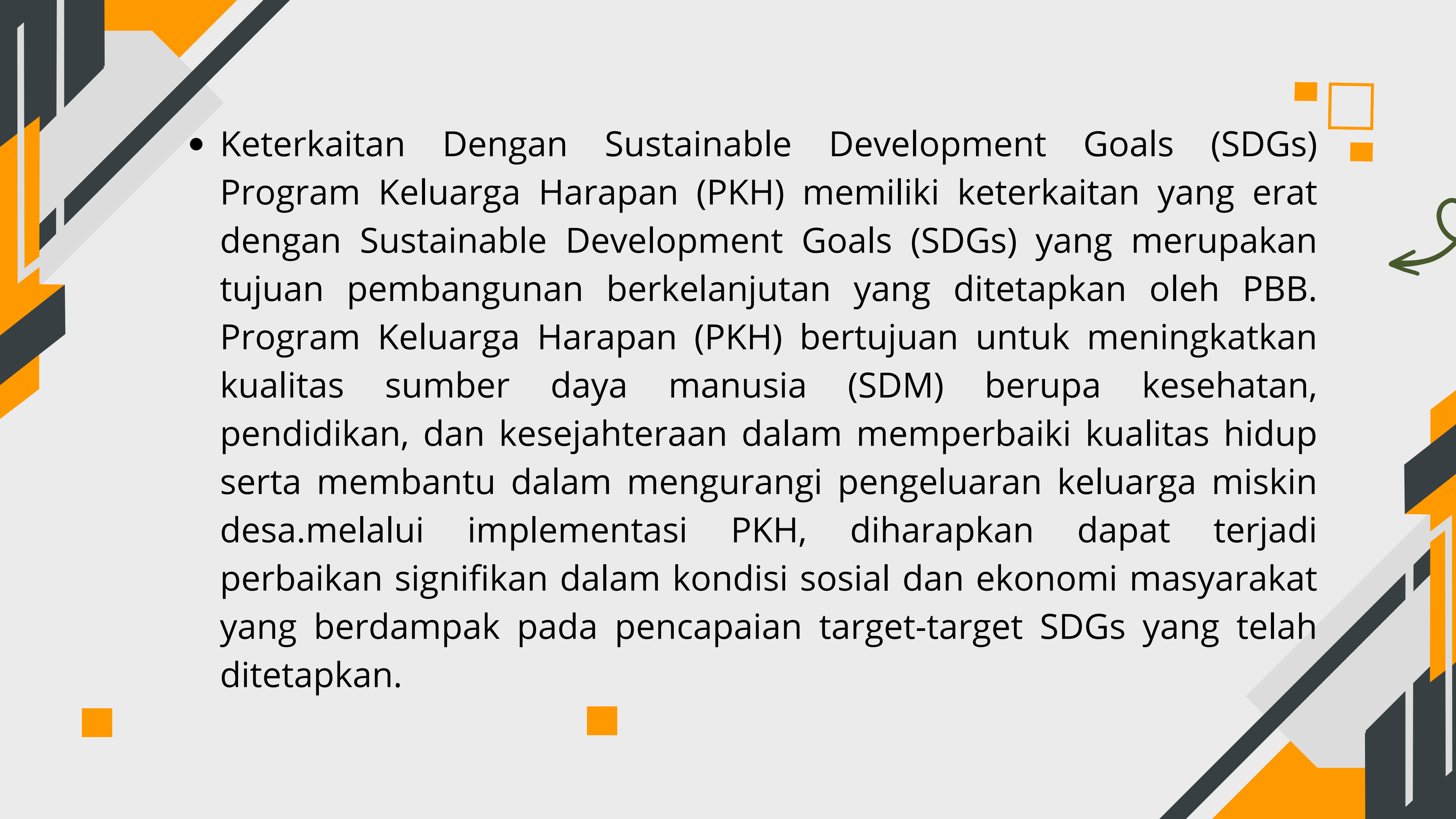
The slide features a light grey background with abstract geometric shapes in orange and dark grey. These shapes are primarily located along the left and right edges, creating a modern, architectural feel. In the top right corner, there is a small cluster of three orange squares, one of which is an outline. The text is centered and presented in a clean, black, sans-serif font.

### 3. Peningkatan Partisipasi Stakeholder

Dalam implementasi konsep SDGs, salah satu tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder yang terlibat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan mekanisme kelembagaan yang kuat yang didukung oleh keterlibatan seluruh aktor, tidak hanya dari lembaga pemerintah, tetapi juga dari LSM, lembaga swasta, akademisi, LSM internasional, mitra pembangunan dan masyarakat umum. Masing-masing aktor mempunyai peran penting dalam implementasi SDGs di Indonesia.

## 2.4 Implementasi SDGs di Indonesia

- Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Meskipun tingkat dan jumlah kemiskinan di tiap negara berbeda-beda tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada negara yang tidak pernah menghadapi masalah kemiskinan ini. Di Indonesia pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat-syarat tertentu di bidang pendidikan dan kesehatan.

- 
- Keterkaitan Dengan Sustainable Development Goals (SDGs)  
Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki keterkaitan yang erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berupa kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dalam memperbaiki kualitas hidup serta membantu dalam mengurangi pengeluaran keluarga miskin desa. melalui implementasi PKH, diharapkan dapat terjadi perbaikan signifikan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pencapaian target-target SDGs yang telah ditetapkan.

# KESIMPULAN

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia pada tahun 1987 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland. Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan pembangunan hukum yang berkelanjutan. Terdapat beberapa teori utama tentang pembangunan berkelanjutan, di antaranya teori Brundtland, teori kapasitas membawa, teori ekologi manusia, teori ekonomi hijau, teori keadilan antargenerasi, teori pembangunan manusia, teori tata kelola yang baik, teori partisipasi masyarakat, teori kearifan lokal, dan teori teknologi tepat guna. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian sasaran yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicapai secara global hingga tahun 2030 yang berfokus pada kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan peningkatan kesejahteraan. SDGs mencakup 17 tujuan spesifik, yang masing-masing memiliki serangkaian target yang dapat diukur. Implementasi SDGs di Indonesia memiliki tantangan dan peluang, di antaranya penyelarasan SDGs dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, koordinasi vertical dan horizontal antar lembaga pemerintah, dan peningkatan partisipasi stakeholder. Salah satu implementasi SDGs di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berupa kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dalam memperbaiki kualitas hidup serta membantu dalam mengurangi pengeluaran keluarga miskin desa. PKH memiliki keterkaitan yang erat dengan SDGs dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kemiskinan.